

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap penegakan hukum administrasi terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, penulis telah menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Administrasi terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan Perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang izin TDUPar sudah dilakukan cukup baik, dimana ketentuan dan kewajiban yang ada sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan hukum administrasi pada dasarnya adalah sebuah tindakan penegakan hukum yang mana dilakukan oleh aparatur pemerintah yang berwenang. Penegakan hukum administrasi sendiri memiliki lingkup dimana aparatur pemerintah dapat melakukan pengawasan, pembinaan serta pemberian sanksi administrasi. Dalam hal ini kasus pelanggaran atas usaha karaoke di Kabupaten Bantul, aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan fungsi dari hukum administrasi itu sendiri. Aparatur pemerintah daerah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul, merupakan aparatur pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas adanya pelanggaran usaha karaoke di Kabupaten Bantul. Dinas. Dalam hal ini, mereka telah melakukan penegakan hukum administrasi terhadap para usaha karaoke yang melanggar tersebut, seperti pengawasan yang mereka lakukan, pembinaan hingga pemberian sanksi terhadap para pengusaha karaoke tersebut. Meskipun begitu,

penegakan hukum administrasi yang dilakukan masihlah belum sempurna dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat yang dimiliki oleh para instansi pemerintah daerah yang berwenang tersebut.

2. Faktor penghambat terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan Perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang izin TDUPar, antara lain:
 - a. Beberapa kendala dalam penegakan hukum administrasi yang dialami oleh instansi pemerintah daerah yang terkait, dimana seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk saat ini terhambat dalam biaya operasional, sehingga tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan langsung ke lapangan serta Satuan Polisi Pamong Praja dimana mereka memiliki kendala dalam hal personil dan juga adanya kebocoran informasi yang sifatnya kerahasiaan internal.
 - b. Faktor penyelenggaran usaha karaoke yang di terjadi di masyarakat, dimana saat ini masyarakat cenderung melakukan pelanggaran ketimbang melakukan izin. Sebab adanya perilaku tersebut karena faktor peraturan izin usaha karaoke yang saat ini menyulitkan penerbitan izin sehingga masyarakat lebih memilih tetap melakukan pelanggaran serta faktor ekonomi mengakibatkan banyaknya oknum yang mengakibatkan usaha karaoke tersebut tetap hadir walaupun telah beberapa kali di tutup paksa oleh pemeritnah Daerah Kabupaten Bantul.

B. Saran

1. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat meningkatkan kualitas dalam penegakan hukum adminsitrasinya terutama dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi adminsitratif. Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah dalam peningkatan segi SDM yang mana perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantul dapat meningkakan kualitas SDM

melalui pembinaan serta menambah jumlah SDM dalam rangka meningkatkan kinerja penegakan hukum administrasi. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu dapat lebih melihat permasalahan keuangan yang dialami oleh instansi yang terkait dalam penegakan hukum administrasi, dimana dalam hal ini dapat membantu dana yang dirasakan kurang mencukupi terhadap instansi tersebut.

2. Perlu adanya pembenahan dalam kinerja yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang terkait dalam hal kasus karaoke yang terjadi, yang mana dalam hal ini kerap ditemui adanya permasalahan penegakan hukum administrasi yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini, faktor kebocoran informasi yang kerap terjadi saat ini dirasa merupakan suatu hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan pembenahan kinerja serta dapat menindak lanjuti permasalahan yang terjadi, baik itu secara internal maupun eksternal. Upaya pembinaan dan pengawasan kepada para pengusaha karaoke juga diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi. Serta Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan dalam hal ini, untuk bisa memaksimalkan penindakan terhadap oknum didalam masyarakat yang kerap diduga sebagai salah satu penyebab usaha karaoke liar itu sendiri terjadi kembali.

